

**IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* : ANALISIS
YURIDIS TIDAK DAPAT DITERIMANYA PENUNTUTAN PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus?2013)**

TESIS

**Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh:
Hendi priono
NIM. 201810380211006

**DIREKTORAT PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Juli 2020**

**IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*: ANALISIS
YURIDIS TIDAK DAPAT DITERIMANYA PENUNTUTAN PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013)

Diajukan oleh :

HENDI PRIONO
201810380211006

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at 24 Juli 2020**

Pembimbing Utama

Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping

Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Mokh. Najih, Ph.D

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

HENDI PRIONO
201810380211006

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Jum'at, 24 Juli 2020**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Tongat, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Penguji I : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si.,
M. Hum

Penguji II : Dr. Haris Tofly, S.H., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendi Priono
Nim : 2018103802111006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir Tesis dengan judul :

Implementasi Konsep *Restorative Justice*: Analisis Yuridis Tidak Dapat Diterimanya Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013)

Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

2. Apabila ternyata didalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Agustus 2020

Yang menyatakan


HENDI PRIONO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, Segala Puji Bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam penulisan tugas akhir ini hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul *Implementasi Konsep Restorative Justice: Analisis Yuridis Tidak Dapat Diterimanya Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013)*.

Dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini penulis terselesaikan atas dukungan banyak pihak, maaka penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu, ayah, isteri, dan anak-anaku tercinta yang selalu memberikan doa yang tulus untuk meraih gelar S-2 Magister Ilmu Hukum;
2. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang menjadi teladan bagi penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
3. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhamamadiyah yang menjadi teladan bagi penulis selama menimba ilmu di Kampus Putih tercinta, Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya;
4. Dr. Moh. Najih, SH., M.Hum selaku Kepala Prodi Magister ilmu Hukum UMM.
5. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini;
6. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II memberikan motivasi dan sumbangan pemikiran dalam penulisan tesis ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan teman-teman Kelas B angkatan 2018 Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Malang, 18 Agustus 2020

Penulis

HENDI PRIONO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTSRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	3
Tinjauan Pustaka	
1. Penelitian Terdahulu	4
2. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5
2.1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5
2.2. Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	6
2.3. Ketentuan-Ketentuan Pidana	8
2.4. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	9
2.5. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	10
2.6. Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga	11
3. Independensi Hakim Dalam Putusan Pidana	13
3.1 Putusan.....	13
3.2. Jenis-jenis dan Bentuk Putusan Hakim Dalam Kasus Pidana	13
3.3 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim	14
3.4 Kedudukan dan Independensi Hakim	15
4. <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	18
4.1 <i>Restorative Justice</i> Sebagai Salah Satu Tujuan Pidana	19
4.2 Interpretasi Hukum dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Putusan	20
Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	25
6. Analisa Bahan Hukum	26
Hasil dan Pembahasan	
1. Tinjauan Hukum Acara Pidana.....	27
2. Tinjauan Penerapan <i>Konsep Restorative Justice</i>	30
Penutup	
1. Kesimpulan	33
2. Saran	33
Daftar Pustaka	34
Lampiran	36

**IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* : ANALISIS
YURIDIS TIDAK DAPAT DITERIMANYA PENUNTUTAN PERKARA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus?2013)**

Hendi Priono
Nim : 2018103802111006
email: gushandy60@gmail.com
Dr. Tongat, S.H.,M.Hum
NIDN : 0013016701

Dr. Surya Anoraga, S.H.,M.Hum
NIDN : 0012076402

ABSTRAK

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia menjadi momentum yang sangat penting, sebuah undang-undang yang merupakan tindak lanjut hasil konvensi internasional dan bertujuan untuk mencegah perilaku kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan keluarga khususnya kaum perempuan dalam segala aktifitasnya. Pada pelaksanaannya ternyata terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak otomatis mampu memenuhi harapan kaum perempuan yang sebagian besar menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan karena kondisi penegakkan hukum di Indonesia yang rawan praktik diskriminatif terhadap kaum perempuan. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhasan tersendiri karena pelaku dan korban adalah mereka yang hidup dalam lingkup rumah tangga sebagai urusan keluarga (hukum privat) yang seolah didorong menjadi urusan publik (hukum publik).

Restorative Justice adalah sebuah konsep seyogyanya dijadikan pertimbangan oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga, namun sayangnya hingga saat ini konsep tersebut belum diatur dalam perundang-undangan termasuk dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi putusan penting (*landmark decision*) dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Putusan Nomor 1600 K/Pid.B/2009 yang didalamnya mengandung pertimbangan *restorative justice* dalam tindak pidana umum yang kemudian menjadi rujukan atau patokan bagi hakim-hakim di pengadilan untuk menerapkan konsep *restorative justice*. Salah satunya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi objek penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2238 K/Pid.sus/2013. Dalam putusannya hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima karena korban telah mencabut aduannya dalam persidangan padahal pencabutan tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam KUHP. Sebuah putusan yang seolah melanggar hukum acara pidana namun mampu memberikan keadilan substantif Dalam putusannya Hakim lebih mengedepankan pertimbangan hukum non yuridis yaitu: adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban melalui mediasi penal sebagai aplikasi konsep *restorative justice*, sebagai sarana yang paling efektif untuk kembali menciptakan keharmonisan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2238 K/Pid.sus/2013, Tidak Dapat Diterima Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Restorative Justice*.

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT: JURIDICIAL ANALYSIS
OF UNACCEPTABILITY IN PROSECUTING CASES OF DOMESTIC VIOLENCE
(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 2238 K/PID.SUS/2013)**

Hendi Priono
Nim : 2018103802111006
email: gushandy60@gmail.com
Dr. Tongat, S.H.,M.Hum
NIDN : 0013016701

Dr. Surya Anoraga, S.H.,M.Hum
NIDN : 0012076402

ABSTRACT

The issuance of law no. 23/2004 concerning the elimination of domestic violence in Indonesia is a very important momentum, a requested which is a follow up to the results of international conventions and aims to prevent behavior of violence and discrimination in the family environment, especially women in all their activities.

The issuance of law number 23 of 2004 regarding the elimination of domestic violence is not automatically able to meet the expectations of women who are mostly victims of violence to get justice because the conditions of law enforcement in Indonesia are prone to discriminatory practices against women. In addition, domestic violence is a criminal act that has its own peculiarities because the perpetrators and victims are those who live within the scope of household as family affairs (private law) which are pushed to become public affairs (public law).

Restorative justice is a concept that should be considered by judges who examine, adjudicate and decide on domestic violence that aims to restore the balance of marital relations in the life of the household. But unfortunately until now the concept has not been regulated in legislation including law no. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence. One of the decisions of the supreme court of Republic of Indonesia which became an important decision (landmark decision) and become jurisprudence of the supreme court of Republic of Indonesia is decision number 1600 K/Pid.B/2009 which contains consideration of restorative justice in general criminal acts which then become a reference or benchmark for judges in the court to apply the concept of restorative justice. One of them in case of domestic violence which is the object of this research is the supreme court of Republic of Indonesia is decision number 2238 K/Pid.sus/2013. In the decision, the supreme court of Republic of Indonesia stated that with the public prosecution was unacceptable because the victim had made peace with defendant so that victim withdrew his complaint in the trial even though the revocation had exceeded the time limit specified in the criminal code. A decision that seemed to violate criminal procedure law but was able to provide substantive justice. In its decision the judge put forward non-judicial legal considerations namely: the existence of peace between the defendant and the victim through mediation of punishment as the application of the concept restorative of justice, as the most effective means of recreating harmony between husband and wife in married life.

Keyword: *the supreme court of Republic of Indonesia is decision number 2238 K/Pid.sus/2013,
Unacceptable claims for domestic violence matters, restorative justice.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia menjadi momentum yang sangat penting, sebuah undang-undang yang merupakan tindak lanjut hasil konvensi internasional dan bertujuan untuk mencegah perilaku kekerasan dan diskriminasi dalam lingkungan keluarga khususnya kaum perempuan dalam segala aktifitasnya. Tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih belum maksimal menyebabkan pihak korban kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya jika pihak pelaku adalah suami, sedangkan korbannya adalah isteri maka isteri kerap memilih gugatan cerai sebagai cara untuk menyelesaikan kekerasan yang terjadi pada dirinya, karena hukum pidana dengan vonis pidana penjara pada pelaku (suami) sering melahirkan permasalahan baru dalam kehidupan berumah tangga.

Restorative Justice adalah sebuah konsep yang seyogyanya dijadikan pertimbangan oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga, namun sayangnya hingga saat ini konsep tersebut belum diatur dalam perundang-undangan termasuk dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aspek materi'il berkaitan dengan upaya untuk memulihkan kembali hubungan antara pelaku (suami) dan korban (isteri) semestinya menjadi instrument terpenting dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan putusan dalam persidangan. Meskipun konsep *restorative justice* sampai pada saat ini belum diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, namun hakim dapat menerapkannya dalam sebuah putusan karena hakim memiliki kekuasaan untuk menemukan dan merumuskan hukum terhadap hukum yang belum jelas pengaturannya.¹ Salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi putusan penting (*landmark decision*) dan menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah

¹ Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945

Putusan Nomor 1600 K/Pid.B/2009 yang didalamnya mengandung pertimbangan *keadilan restorative* dalam tindak pidana umum yang kemudian menjadi rujukan atau patokan bagi hakim-hakim di pengadilan untuk menerapkan konsep *restorative justice*, salah satunya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi objek penelitian ini, Putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013.

Adapun kronologis singkatnya, Terdakwa Sudarta bin Wahid pada Minggu 11 Desember 2011 melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan korban yaitu Kamini binti Sani yang menolak diajak berhubungan badan dengan alasan sakit. Akibat kekerasan tersebut korban mengalami luka dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cirebon pada tanggal 12 Desember 2011, kemudian perkara tersebut masuk ke Persidangan Pengadilan Negeri Cirebon, dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 44 ayat (1) atau Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Singkat cerita, setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, pada persidangan berikutnya Terdakwa mengajukan Surat Perdamaian yang sekaligus berisi Pencabutan Perkara dari Korban. Selanjutnya setelah memeriksa korban (isteri Terdakwa) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber melalui Putusan Pengadilan Negeri Sumber No. 336/Pid.B/2012/PN.Sbr. menyatakan mengabulkan pencabutan perkara pidana yang diajukan oleh Korban berdasarkan Fakta persidangan. Atas Putusan tersebut Penuntut umum melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan argumentasi bahwa dalam dakwaannya ada dua jenis delik, yaitu: Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT merupakan Delik Biasa, sedangkan Pasal 44 ayat 4 UU PKDRT merupakan Delik Aduan. Selanjutnya Putusannya Pengadilan Tinggi Bandung No. 372/Pid.Sus/2012/PT.BDG membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut. Atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut Terdakwa mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan berbagai argumentasi keberatannya, salah satunya adalah karena sudah ada perdamaian dan pencabutan perkara oleh Korban. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013 menyatakan menerima dan mengabulkan Kasasi Terdakwa dengan amar putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Mengadili Sendiri: Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang implementasi konsep *restorative Justice* dalam putusan tidak dapat diterimanya tuntutan menuntut umum sebagai akibat adanya pencabutan perkara dari korban/isteri dalam persidangan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pencabutan perkara oleh isteri terdakwa yang sejatinya melebihi batas waktu yang ditentukan (dilakukan dalam persidangan), namun dengan pertimbangan adanya perdamaian dan pencabutan perkara oleh isteri terdakwa tersebut hakim kemudian memutuskan untuk menyatakan menerima pencabutan perkara dan menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Sebuah putusan yang seolah bertentangan dengan hukum pidana formil. Dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan konsep *restorative justice*, hakim lebih melihat filosofi dan tujuan UU No. 23 Tahun 2004 untuk mewujudkan keadilan substansial dalam masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut menjadi sesuatu yang menarik mengingat Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum *rule of law* yang mengutamakan sumber hukum tertulis sebagai sumber hukum, namun dilihat dari pola kombinasi berbagai elemen hukum seperti adanya hukum sipil, hukum adat, dan hukum adat sistem hukum Indonesia sejatinya adalah hukum campuran (*mixed law*)².

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan pengkajian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Dengan demikian maka judul penelitian ini adalah sebagai berikut: “ *Implementasi Konsep Restorative Justice : Analisis Yuridis Putusan Tidak Dapat Diterimanya Penuntutan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013)*”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013 tersebut ditinjau sisi Hukum Acara Pidana ?.

² Abdul Hadi [https://tirto.id/mengenal-sistem-hukum-di-berbagai-belahan hukum-dunia...](https://tirto.id/mengenal-sistem-hukum-di-berbagai-belahan-hukum-dunia...) diakses 12 20 Februari 2020.

2. Bagaimanakah penerapan konsep *restorative justice* dalam putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013 tersebut ?.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya baik dalam bentuk jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian oleh Muhammad Yusuf Siregar yang berjudul "*Analisa Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009)*". Sebuah penelitian tentang pencabutan perkara pidana dalam persidangan dalam perkara pencurian dimana hakim mengabulkan pencabutan tersebut berdasarkan adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban yang merupakan tindak pidana umum.³
2. Artikel dalam Lex Crimen Volume II No 3 tahun 2013 yang ditulis Neriati Takaliung yang berjudul "*Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Sebuah artikel tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Penelitian dalam Lex Crimen Volume IV No 1 tahun 2015 yang ditulis oleh Justisi Devli Wagiu yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan*". Sebuah penelitian tentang implementasi keadilan restoratif melalui mediasi penal dalam tindak pidana penggelapan sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang tidak harus berujung pada Pengadilan jika pelaku kejahatan bersedia untuk mengembalikan kerugian korban dan korban pun telah memaafkan.

Adapun karya ilmiah yang berupa buku yang membahas tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun penerapan *restorative justice* di antaranya:

1. Buku yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Rumah Tangga*" yang ditulis oleh Diah Septita, tahun 2010 diterbitkan oleh Universitas

³ Muhammad Yusuf Siregar. 2014, *Analisa Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009)*". USU Law Jurnal, Medan.

Udayana yang salah satunya membahas tentang tujuan hukum pidana yang tidak semata-mata untuk menjatuhkan pidana namun bisa berupa tindakan-tindakan lain.

2. Buku yang berjudul "*Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*" ditulis oleh Eva Achjani Zulva pada tahun 2011 diterbitkan oleh Departemen Kriminologi FISIP UI yang salah satunya membahas tentang kewenangan peran negara untuk menetapkan sejumlah norma sebagai penyelesaian konflik tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada prinsipnya kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena pelanggaran hak asasi manusia, sehingga masalah kekerasan rumah tangga merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak-anak, dan kekerasan tersebut dapat terjadi ditempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan dilingkungan keluarga atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁴ Rumah tangga yang semestinya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan sebagai isteri sekaligus ibu dari anak-anak justru seringkali mengalami penderitaan baik seksual, fisik maupun psikis dari sang suami. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, dan seksual terutama terhadap kaum perempuan dalam lingkup rumah tangga.⁵

Penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga ini bersesuaian dengan filosofi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu nilai-nilai luhur perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan bahagia. Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004, antara lain: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam

⁴ Mudjiati, *Penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, <http://djpp.depukumham.go.id/hukumpidana/85>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020.

⁵ Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 *Tentang PKDRT*

rumah tangga dan memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah konsep yang menjadi gambaran perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap isteri. Kekerasan terhadap isteri bukanlah sekedar isu belaka melainkan sebuah gambaran mengenai peristiwa yang kerap terjadi akibat kekuasaan yang tidak seimbang laki-laki dimana dengan otoritasnya ia mampu untuk mengontrol, dan mendominasi dalam kehidupan berumah tangga maupun bermasyarakat.⁶

2.2 Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: a) Suami, isteri, dan anak, b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, c) Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. .

Negara juga memberikan perlindungan hak-hak korban kekerasan sebagaimana tercantum Adapun dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 :⁷ a) Jaminan Perlindungan dari aparat penegak hukum yaitu: Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, maupun institusi swasta berdasarkan penetapan perintah perlindungan pengadilan, b) Mendapat pelayanan medis jika dibutuhkan, c) Terjaganya kerahasiaan korban jika diminta yang bersangkutan, d) mendapat bantuan hukum disegala tingkat pemeriksaan., e) Mendapat Bimbingan Rohani.

Bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain: a) kekerasan psikis. b) kekerasan fisik, dan c) kekerasan seksual, seperti tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004:⁸

Tabel

No.	Bentuk Kekerasan	Definisi
1.	Pasal 5, Kekerasan Fisik	Kekerasan yang mengakibatkan sakit baik

⁶ Shinta Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti. 2014. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*. LBH APIK. Jakarta. hal. 35.

⁷ Lihat Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004.

⁸ *Ibid.*, hal. 3.

		ringan maupun berat
2.	Pasal 7, Kekerasan Psikis	Kekerasan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, ketidakberdayaan, dan atau penderitaan psikis berat.
3.	Pasal 8, Kekerasan Seksual	Pemaksaan hubungan seksual dalam lingkungan rumah tangga untuk tujuan komersil atau untuk tujuan tertentu.
4.	Pasal 9, Penerlantaran Dalam Rumah Tangga.	Penerlantaran dalam lingkup rumah tangga. terhadap orang yang menurut hukum berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian atau ketergantungan ekonomi terhadap orang tersebut

Dari beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diuraikan di atas, terdapat beberapa bentuk kekerasan yang digolongkan sebagai tindak pidana aduan (*klacht delict*). Menurut Sudarto, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaendeerdepartij*).⁹ Salah satu yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap isteri maupun suami adalah masalah klasik yang kerap terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Identifikasi yang cermat terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan menjadi modal penting untuk merumuskan langkah strategis sebagai solusi dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam, yaitu: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal lebih terkait dengan dengan kekuasaan suami dalam rumah tangga dan diskriminasi di kalangan masyarakat.¹¹

⁹ Sudarto. , 2013. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. hal. 98

¹⁰ Didik Sukardi. *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015. Hal 43-44.

¹¹ Mulyani Mudis Taruma. 2012. *Agama Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Lembaga-lembaga Keagamaan*. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta. hal. 57

- a. Kedudukan laki-laki yang superior terhadap perempuan yang seolah merupakan sebuah kodrat.
- b. Interpretasi ajaran agama yang kurang tepat, seperti penafsiran konsep *nusyuz* yang kerap menjadikan perempuan sebagai pelaku, sehingga suami dengan mudahnya diperbolehkan untuk melakukan pemukulan terhadap isterinya dengan alasan pendidikan dan keengganan isteri untuk bersedia melayani suami setiap saat.
- c. Kekerasan yang terjadi yang seolah dilegitimasi oleh faktor budaya dalam kehidupan masyarakat.

2.3 Ketentuan-ketentuan Pidana

Selanjutnya uraian tentang kekerasan dalam rumah tangga dan sanksinya sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, antara lain:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit/luka baik ringan maupun berat. Adapun sanksinya diatur dalam pasal 44 ayat 1 sampai ayat 4 , dengan variasi pidana penjara mulai 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak mulai Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) paling banyak Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya Apabila perbuatan kekerasan tersebut dilakukan salah satu pasangan suami isteri yang mengakibatkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktifitas sehari-hari maka sanksinya adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
- b. Kekerasan psikis adalah Perbuatan yang menimbulkan rasa takut , hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, ketidakberdayaan, dan atau penderitaan psikis. Adapun sanksinya diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan 2, yaitu: pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*).
- c. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan pemaksaan yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual seseorang dalam lingkup rumah tangganya dalam orang lain untuk tujuan komersil atau untuk tujuan tertentu.

- d. Kekerasan yang berupa tindakan penerlantaran orang yang terjadi dalam rumah oleh orang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan hidup atau juga terhadap orang yang memiliki ketergantungan ekonomi karena adanya pembatasan atau pelarangan untuk bekerja di luar rumah sehingga yang bersangkutan berada di bawah kendali.

2.4 Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum pidana dilihat dari jenis deliknya dibagi menjadi dua, yaitu: delik umum dan delik Aduan. Dalam delik umum perkara pidana dapat diproses oleh pihak Kepolisian tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (Korban) dan oleh karenanya delik umum/biasa tidak bisa dicabut, namun demikian ada batas kadaluarsa seperti yang ditentukan dalam KUHAP. Sedangkan dalam delik aduan Kepolisian hanya akan memproses suatu perkara jika ada Laporan atau Pengaduan dari Pihak yang dirugikan (Korban), dan itupun selambatnya 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut diketahui jika Korban berada di Indonesia, dan 9 (Sembilan) bulan jika Korban berada di Luar Negeri. Delik aduan yang diatur dalam Pasal 72-75 KUHP. Delik aduan terdiri atas dua kata, yaitu “delik” dan “aduan”. Menurut Moeljatno, bahwa delik adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²

Meskipun KUHP dan KUHAP tidak menjelaskan maksud diadakannya delik tersebut, akan tetapi sudah barang tentu diadakannya delik tersebut mempunyai maksud dan tujuan. Delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari korban tindak pidana atau yang berkepentingan. Dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia Samidjo menyatakan bahwa delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya.¹³ Penuntutan dalam delik aduan adalah hak dari setiap korban, namun korban berhak untuk melakukan pencabutan perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 KUHP berbunyi: “*Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah*

¹² Wantjik Saleh. 1997. *Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 10

¹³ Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico. Bandung. hal. 154

pengaduan diajukan”. Peraturan ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada korban atau pengadu jika berubah pikiran karena berbagai alasan, misalnya telah permintaan maaf dari pelaku dan kesediannya untuk memberikan ganti rugi dan Korban telah memaafkannya (terjadi perdamaian).

Pencabutan dalam delik aduan memiliki konsekuensi hukum bagi penuntut umum dalam terkait dengan kewenangannya untuk melakukan penuntutan. Dalam KUHP mengenai Gugurnya penuntutan hanya disebabkan karena beberapa hal antara lain: meninggalnya pelaku kejahatan (Pasal 77 KUHP), adanya asas “*Nebis in idem*” (Pasal 76 KUHP), daluwarsa (Pasal 78 KUHP), penyelesaian Perkara di Luar Persidangan (Pasal 82 KUHP), Amnesti dan Abolisi dari Presiden (Pasal 14 UUD 1945), dan tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Dengan demikian Kitab Undang-Undang Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 juga mengatur bagaimana cara korban untuk melakukan pelaporan. Pelaporan adanya dugaan tindak pidana bisa dilaporkan secara langsung oleh korban ke Mapolres setempat, baik ditempat ia berdomisili maupun di tempat dimana tindakan kekerasan itu terjadi.¹⁴ Dalam pelaporan korban bisa diwakili oleh keluarga atau orang lain yang diberi kuasa untuk melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan tersebut.¹⁵ Jika korban masih di bawah umur maka laporan dapat diwakili oleh orang tua, wali pengasuh, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

2.5 Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada perbedaan yang mendasar antara Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KUHP lebih memprioritaskan terlaksananya pemeriksaan terhadap pelaku, sedangkan UU No. 23

¹⁴ Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Tahun 2004 lebih memprioritaskan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

UU No. 23 Tahun 2004 juga membedakan dengan jelas fungsi pelayanan perlindungan hukum bagi korban. Dengan kata lain tidak semua lembaga dan instansi diberi hak untuk memberikan perlindungan terhadap korban apalagi untuk bertindak memberikan sanksi kepada pelaku. Perlindungan oleh lembaga non-penegak hukum dan instansi terbatas hanya untuk memberikan konsultasi, upaya mediasi, dan pendampingan hukum, serta rehabilitasi.¹⁷, dengan kata lain tidak sampai pada proses litigasi. Meskipun demikian, peran institusi dan lembaga *non judicial* itu tentu sangat penting dalam upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 16 sampai pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004, yaitu: a) Perlindungan sementara oleh pihak kepolisian kepada korban dalam waktu 1 x 24 jam sejak mengetahui atau menerima laporan adanya dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, b) Perlindungan oleh pihak kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari, c) Dalam memberikan perlindungan kepada korban pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada, d) Permohonan pihak kepolisian kepada Pengadilan, dan dalam waktu 1 x 24 jam melalui penetapan pengadilan, e) Permohonan perlindungan kepada Pengadilan dapat diajukan sendiri oleh korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

2.6 Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selain adanya beberapa perbedaan dengan KUHP. UU No. 23 Tahun 2004 memiliki beberapa kelebihan, di antaranya: a) Mendorong dan menjadikan kasus kekerasan dalam Rumah Tangga dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik, b) UU No. 23 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam hukum dalam hukum acara pidana terkait dengan pembuktian yaitu tidak berlakunya prinsip satu saksi bukan saksi, karena UU ini mengesahkan keterangan saksi korban KDRT ditambah visum

¹⁷ Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 181.

dokter telah memenuhi syarat adanya pembuktian adanya tindak pidana kekerasan, c) Perluasan cakupan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UU ini, yaitu tidak hanya suami, isteri, anak namun juga siapapun yang ada dalam rumah tangga tersebut, d) Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh UU ini termasuk kekerasan fisik, psikis dan seksual juga penerlantaran rumah tangga.

Selain adanya perbedaan di atas UU No. 23 Tahun 2004 ini juga memiliki kelebihan-kelebihan yang ironisnya justru melahirkan kebimbangan bagi para ahli hukum pidana di Indonesia juga termasuk para hakim, jaksa dan kepolisian yang terbiasa dengan kuatnya paradigma legalistiknya sehingga penerapan UU No. 23 Tahun 2004 sehingga kelebihan yang dimiliki UU ini masih belum efektif. Melihat pada kategorisasi ruang lingkup perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, maka terhadap perkara KDRT yang dikategorikan sebagai tindak pidana aduan dapat ditangani dengan cara mediasi penal, meskipun secara teoritis terhadap perkara KDRT yang dikategorikan tindak pidana aduan dapat ditangani secara mediasi penal, namun aparat penegak hukum pidana lebih suka menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai rujukan penanganan perkarannya.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam UU No. 23 Tahun 2004 dinamakan dengan sistem peradilan pidana terpadu, dalam artian pemeriksaan dan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini bukan sekedar dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan melainkan memprioritaskan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya sebagaimana tujuan penghapusan tujuan kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004. Mediasi penal merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian perkara dengan negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban.¹⁸ Meskipun pada prinsipnya, di dalam hukum positif untuk perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Artinya setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan pidana. Namun dalam praktiknya penegakkan hukum sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum,

¹⁸ Barda Nawawi Arief. 20120. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.*: Pustaka Magister. Semarang. hal. 1-2.

mekanisme perdamaian, lembaga adat, dan lain sebagainya.¹⁹ Jadi penggunaan mediasi penal sebenarnya belum atau tidak ada pengaturannya di dalam hukum pidana positif melainkan merupakan inisiatif penegak hukum dengan melibatkan pelaku dan korban.

3. Independensi Hakim Dalam Putusan Pidana

3.1 Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan instrument terpenting guna penyelesaian kasus pidana terkait dengan kepastian hukum status terdakwa serta dalam menyiapkan upaya hukum selanjutnya, seperti upaya hukum. Secara tegas pengertian putusan hakim adalah apa yang tercantum Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan hakim pada intinya adalah pernyataan hakim secara terbuka di persidangan yang bisa berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan. Putusan hakim merupakan instrumen paling penting sebagai puncak penyelesaian kasus pidana dalam hal mendapatkan kepastian hukum tentang status terdakwa maupun persiapan untuk menempuh upaya hukum selanjutnya.

3.1.1 Jenis-jenis dan Bentuk Putusan Hakim dalam Kasus Pidana

Setelah melalui serangkaian tahap pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan perkara pidana, maka tahapan berikutnya hakim mengeluarkan putusannya. Jenis putusan hakim ada dua, yaitu:

a. Putusan Sela

Dakwaan adalah instrument penting yang menjadi arah pemeriksaan perkara pidana karena merupakan kerangka arah pemeriksaan perkara terhadap terdakwa. Dengan kata lain arti hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa harus sesuai dengan pasal yang didakwakan dan dituntutkan oleh penuntut umum. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 KUHAP.

b. Putusan Akhir

¹⁹ *Ibid. hal. 2.*

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi-saksi dan pelaku dinyatakan selesai oleh hakim, maka selanjutnya hakim sebagai pelaksana inti kekuasaan kehakiman akan menjatuhkan putusan akhir sebagai penyelesaian perkara, disebut putusan akhir. Adapun putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara bisa berbentuk, sebagai berikut:²⁰

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*), yaitu putusan yang menyatakan terdakwa bebas jika ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*), yaitu putusan yang menyatakan terdakwa lepas segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim jika dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), c) Putusan Pemidanaan, yaitu dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan apa yang diperbuatnya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan pemidanaan, harus memuat apa yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut: Kepala putusan, identitas terdakwa, dan dakwaan/tuntutan, pertimbangan hukum hakim mengenai fakta dan penyertaan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

3.1.2 Pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus menyusun pertimbangan hukum-pertimbangan sebagai dasar untuk mengadilili dan menyelesaikan perkara. Pertimbangan hukum secara sederhana didefinisikan sebagai suatu rumusan majelis hakim berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari

²⁰ M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 326-333.

dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta alat-alat bukti di persidangan, pledoi terdakwa atau penasehat hukumnya. Dalam menyusun pertimbangan hukum hakim harus mencantumkan pasal dan peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam membuat sebuah putusan.²¹

Ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis: a) Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang ditetapkan oleh undang-undang kewajiban untuk memuatnya dalam putusan. Pada prakteknya pasal dalam peraturan hukum tersebut harus selalu berhubungan dengan perbuatan terdakwa. Pembuktian oleh penuntut umum dan hakim dalam pemeriksaan alat-alat bukti dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana yang dituduhkan.²² b) pertimbangan Non-Yuridis yaitu pertimbangan yang meliputi antara lain: Latar Belakang Terdakwa, Perbuatan Terdakwa dan Kondisi Diri Terdakwa sebelum peristiwa pidana terjadi.

3.1.3 Kedudukan dan Independensi Hakim

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tentunya hakim memiliki independensi dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara, namun demikian peraturan perundang-undangan juga memberikan batasan pada kekuasaan kehakiman. Paska amandemen ketiga UUD 1945 yaitu penggunaan istilah Negara Hukum, sebagaimana statemen Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Bambang Kesowo sebagai sebuah sikap tidak memihak, penyebutan *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, merupakan konsep konvergentif dan komplementatif. Konsep Negara Hukum selain menjadikan prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsepsi *Rechtsstaat* dan juga tetap mengedepankan rasa keadilan dalam *The Rule of law*.²³

²¹ Damang. 5 Desember 2019. *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>.

²³ Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional, dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Makalah Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 17 Februari 2012, hal. 3.

Independensi kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945.²⁴ Definisi “kemandirian peradilan” adalah bebas dari intervensi pihak lain dari segala bentuk intimidasi baik fisik maupun psikis dengan tujuan perlindungan hukum dan keadilan terhadap masyarakat terutama para pencari keadilan. Hakim sebagai pejabat di Lembaga Peradilan diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan serangkaian tindakannya uharus berdasarkan kebebasan, kejujuran dan netralitas dalam sidang pengadilan sesuai amanat KUHAP.²⁵

Pada perkembangannya hukum acara pidana timbul permasalahan tentang hakim yang bertindak dan dianggap keluar dari aturan hukum yang telah diatur di dalam KUHP dengan maksud membuat pertimbangan yang dirasa lebih memenuhi rasa keadilan bagi pihak terdakwa dalam perkara pidana. Hal tersebut menggambarkan bahwa peradilan harus responsif terhadap perkembangan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.

Gambaran di atas senada dengan teori hukum responsif yang disampaikan Nonet-Selznick. Hukum responsif sebagai sistem hukum yang terbuka merespon dinamika dan perkembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dengan tujuan hukum sebagai prioritas (*the sovereignty of purpose*). Keutamaan tujuan hukum yang merupakan tujuan sosial yang hendak dicapai serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan hukum tersebut.²⁶ Hukum responsif sangat diperlukan terutama dalam masa transisi. Dengan kata lain, ketika sebuah aturan hukum yang diberlakukan dipandang kurang mampu lagi memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi akibat perkembangan kehidupan masyarakat, dimana aturan-aturan hukum yang ada belum mampu untuk menjangkaunya, sehingga hukum harus memiliki kepekaan dan akomodatif terhadap perkembangan masyarakat agar tercapai keadilan di masyarakat.²⁷

²⁴ UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Pasal 1 Angka 8 jo Angka 9 KUHAP.

²⁶ *Ibid.*, hal. 29

²⁷ *Ibid.*

Dalam pendapatnya Nonet-Selznick menyampaikan, *pertama*, hukum harus fungsional, pragmatis, bertujuan dan rasional. *Kedua*, adanya kompetensi sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi aplikasi hukum, karena kompetensi berfungsi sebagai norma kritik, maka tatanan hukum responsif menekankan: keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum, adanya peraturan sebagai sub-ordinasi prinsip dan kebijakan, penyusunan pertimbangan hukum berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan, perluasan diskresi, menanam sistem kewajiban menggantikan system paksaan, moralitas pelaksanaan hukum, pendayagunaan kekuasaan untuk vitalitas hukum, penolakan hukum harus dianggap sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum, dan partisipasi publik dengan akses yang terbuka dalam integrasi advokasi dan sosial.²⁸

Keadilan prosedural adalah keadilan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan hukum formal, seperti mengenai syarat-syarat dan tahapan-tahapan beracara di pengadilan sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang berpedoman pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Keadilan substantif merupakan pedoman keadilan prosedural masih parsial dan belum terpadu dan masih serta belum menjadi gagasan konkrit dalam konsep dan penegakkan keadilan, sehingga penegakkan hukum kerap tidak mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan yang substansial sehingga keadilan masyarakat kerap terabaikan²⁹ Putusan-putusan hakim yang kontroversial kerap tidak diterima masyarakat luas dikarenakan produk hakim tersebut dianggap tidak sesuai rasa keadilan dalam masyarakat yang menyebabkan putusan-putusan yang dijatuhkan dianggap tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang cermat (*onvoeldoende gemotiverd*).³⁰

Adanya kontradiksi antara keadilan prosedural dengan keadilan substantif di sisi lain, memang haruslah dicarikan solusi agar ada harmonisasi dalam setiap putusan

²⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2010. *Hukum Responsif*. terjemahan. Nusa Media. Bandung hal. 84.

²⁹ Bambang Sutiyoso. 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*. Jurnal Hukum No. 2 Vol 17.

³⁰ *Ibid*.

hakim. Dalam perkara yang sangat eksepsional dan spesifik, yaitu ketika terjadi kontradiksi yang tajam antara keadilan prosedural dengan keadilan substantif, maka keadilan prosedural boleh diabaikan. Meskipun demikian tidaklah berarti dalam semua perkara diperbolehkan mengabaikan keadilan prosedural, seperti apa disampaikan oleh Machiaveli, yaitu penghalalan segala cara untuk mencapai tujuan hukum jangan sampai mengabaikan keadilan prosedural apalagi hanya sekedar tujuan tertentu yang tidak essensial.³¹

4. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana

Konsep *restorative justice* timbul karena adanya ketidakpastian sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak menjadikan pihak-pihak yang berkonflik sebagai pihak yang berperkata, melainkan menjadikan konflik seolah hanya antara negara dengan pelaku/terdakwa, sehingga masyarakat khususnya korban tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik. Negara Indonesia sebagai negara hukum menyelesaikan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem untuk menanggulangi kejahatan dalam suatu masyarakat.³² Tujuan sistem peradilan pidana yaitu: a) Pencegahan agar tidak ada korban tindak kejahatan, b) Penyelesaian tindak kejahatan dengan tujuan mewujudkan penegakan keadilan dan pembedaan bagi yang bersalah, c) Pemberian efek jera agar masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan lagi.

Apabila dicermati sejarah munculnya konsep *restorative justice* salah satunya karena sistem peradilan pidana dinilai tidak berjalan sesuai harapan dan tujuan sistem itu sendiri, dengan kata lain sistem peradilan pidana dinilai gagal memberikan perlindungan dan solusi hukum kepada calon korban dan para calon terdakwa, sistem peradilan pidana yang konvensional sekarang ini diberbagai negara justru kerap memunculkan kekecewaan dan ketidakpuasan.

Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa sistem peradilan pidana saat ini dibangun sangat menentukan bagaimana arah peranan negara pada pembangunan dan pelaksanaan hukumberdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara sebagai pemilik otoritas

³¹ *Ibid.*

³² Mardjono Reksodiputro. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. hal. 84.

memiliki kewenangan untuk mengatur warga negara melalui organ-organnya.³³ Negara sebagai pemegang otoritas untuk menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak pemidanaan (*ius puniendi*) sebagai solusi penyelesaian suatu tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi pada perkembangannya institusi hukum pidana sebagai mekanisme penyelesaian konflik ditempatkan sebagai mekanisme terakhir ketika lembaga lain gagal menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, sehingga hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.³⁴

Secara jelas dan singkat Marlina mendefinisikan konsep *restorative justice* sebagai sebuah proses penyelesaian perkara atau sengketa hukum yang terjadi dilakukan dengan cara membawa dan melibatkan korban dan pelaku (tersangka) untuk duduk bersama-sama dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.³⁵

4.1 Restorative Justice sebagai salah tujuan pemidanaan

Prof. Sudarto, menyatakan bahwa kata penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga memiliki artian sebagai upaya menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan sebuah hukum atas suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman juga dapat dipersempit artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/atau penjatuhan pidana oleh hakim.³⁶ Sedangkan Barda Nawawi arief berpendapat syarat pemidanaan ada dua yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan perkataan lain mengenai pemidanaan berhubungan dan terkait erat dengan pokok pemikiran dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.³⁷

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

³³ Eva Achjani Zulfa. 2011. *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*. dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*. Kerjasama LPSK dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta . hal. 27.

³⁴ *Ibid.*, hal 27.

³⁵ Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cet. I. Refika Aditama. Bandung hal. 180

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1988. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua.: Alumni. Bandung. hal. 1.

³⁷ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung. hal. 88

- a. Teori Absolut/*Restributif*/Pembalasan/*lex talionis*, sebagai sesuatu yang harus ada dan dilakukan sebagai konsekuensi atas tindakan kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum. Setidaknya ada tiga syarat yaitu: Perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela, tidak dimaksudkan sebagai prevensi, dan kesimbangan berat hukuman dengan berat delik. Mengenai Tujuan teori pembalasan ini Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat, namun kejahatan itu sendiri yang mengandung unsure-unsur dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³⁸
- b. Teori relative/tujuan (*utilitarian*) bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar untuk pembalasan atas kejahatan yang dilakukannya. Seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki atau merahabilitasi para pelaku kejahatan. Dasar pembenar teori ini terletak pada tujuan pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum* (karena kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka sangat jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban masyarakat.³⁹
- c. Teori gabungan, tujuan pidana tidak sekedar untuk membalas kesalahan penjahat melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan berat pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.⁴⁰

4.2 Interpretasi hukum dan Penerapan *Restorative Justice* dalam Putusan

Indonesia sebagai negara hukum maka keberadaan sebuah lembaga peradilan merupakan suatu keniscayaan. Penegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu fungsi kedaulatan suatu negara. Dalam penegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum. Ketiga unsur tersebut tersebut saling terkait dan harus berusaha dikompromikan secara proporsional dan berimbang. Fungsi hukum dalam kehidupan bernegara tidak hanya untuk

³⁸ Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi-fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. Hal. 52.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hal. 45.

⁴⁰ *Ibid.*

menunjukkan pada dunia internasional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara hukum, tetapi juga untuk menunjukkan pentingnya kesadaran akan fungsi hukum itu sendiri. Baharuddin Lopa menguraikan fungsi hukum tersebut antara lain:⁴¹ a) Alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*), untuk mengubah perilaku masyarakat, b) Alat untuk menilai benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*), c) Alat untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*as a tool of social control*). Dalam perkembangannya terjadi persilangan pendapat tentang eksistensi keberadaan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana telah memunculkan kecenderungan gerakan di Amerika yang menamakan dirinya sebagai gerakan *abolitionis* yang menekankan pada upaya penghapusan pidana penjara (*prison abolitionist*). Sementara itu di Eropa menekankan keberatannya terhadap *criminal justice system as a whole*, yang melihat system kepenjaraan sebagai jantung yang bersifat represif dari hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Dalam pendekatan yang lebih luas ini, maka gerakan ini berusaha menciptakan kerangka teoritis dengan tujuan untuk mematahkan batas yang mengganggu hubungan timbal balik atas dasar saling menghargai antara penguasa dan struktur kebebasan manusia.⁴²

Menurut Satjipto Rahardo bahwa para penegak hukum harus senantiasa berjihad untuk melahirkan kekuatan hukum akan senantiasa memeras dan mendorong kata-kata dari teks hukum sampai ke titik paling jauh (ultimate) sehingga kekuatan hukum keluar dari persembunyiannya. Pengadilan tidak boleh semata-mata menjadi tempat menerapkan undang-undang, melainkan menjadi tempat untuk menguji undang-undang. Hakim bukan *lagiles bouches, qui prononcent les paroles de la loi* (mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang melainkan *vigilante* atau mujtahid.⁴³ Ada beberapa jenis penafsiran hukum yang dikenal, antara lain:⁴⁴

⁴¹ Baharuddin Lopa. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta. hal. 32.

⁴² Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang*. FH UNDIP. Semarang. hal. 18-19

⁴³ Satjipto Rahardo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta. hal. 55

⁴⁴ Ahmad Rifa'I. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. hal.59-67

- a. Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan istilah yang terdapat dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, karena hakim harus memahami suatu teks dalam peraturan perundang-undangan, dengan merujuk makna teks kepada makna yang dibakukan dalam kaidah bahasa. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai pedoman adalah arti perkataan, kalimat menurut tata bahasa atau kebiasaan.
- b. Penafsiran Sejarah, yaitu hukum ditafsirkan dengan merujuk pada catatan proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tersebut. Hakim dapat memahami maksud dan tujuan pembuat undang-undang tersebut melalui sejarah, riwayat peraturan perundang-undangan tersebut.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran suatu peraturan dengan menghubungkan dengan peraturan lain dengan keseluruhan sistem hukum.
- d. Penafsiran Teleologis, yaitu: penafsiran hukum dengan hal-hal konkret yang ditemui dalam masyarakat. Pada dasarnya penafsiran teleologis atau sosilogis ini adalah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat berubah menurut masa dan tempat, sedangkan bunyi undang-undang kaku dan tidak berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang sama saja tetap tidak berubah. Peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial baru.

Selain itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan salah satu jenis penafsiran dalam rangka penemuan hukum disebut dengan interpretasi antisipatif atau futuristis, yaitu penafsiran antisipatif yang dicari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, misalnya rancangan Undang-undang.⁴⁵ Dengan demikian melalui interpretasi antisipatif atau futuristis, pendekatan *Restorative Justice* dapat diterapkan di Pengadilan, khususnya dalam putusan Pengadilan.

Dalam menggunakan interpretasi ini tetap berpedoman bahwa hakim ketika akan memberikan pemidanaan dalam putusannya mengacu pada keadilan. Konsep *Restorative Justice* timbul karena adanya kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan peran dan keadilan yang dirasakan langsung oleh korban. *Restorative Justice* memberikan peran dan keadilan bukan hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit. hal.* 73.

korban bahkan masyarakat. Keadilan dimana tidak ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan sebagaimana yang dimaksud dengan keadilan *fairness* oleh Jhon Rawls.⁴⁶

Terkait dengan konteks penerapan *restorative justice* sebagai dasar pencabutan perkara di persidangan ada sebuah putusan Mahkamah Agung yang bisa menjadi yurisprudensi yaitu: Putusan No. 1600 K/Pid.b/2009. Putusan ini merupakan salah satu *landmark decision* Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2011. Putusan ini secara jelas dan tegas dalam pertimbangannya menggunakan *Restorative Justice*. Majelis hakim dalam pertimbangannya, saat mengabulkan pencabutan perkara oleh korban Ny. Emawati di persidangan dalam kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Ny. Ismayawati, meskipun pencabutan tersebut dilakukan melebihi batas waktu yang ditentukan (3 bulan), Pasal 75 KUHP, hakim menjadikan keseimbangan antara pelaku dan korban melalui adanya perdamaian di antara keduanya sebagai tujuan hukum yang utama.

Namun demikian sejatinya fungsi yurisprudensi adalah untuk mengisi kekosongan hukum “*judge made law*” yang akan dijadikan pedoman kodifikasi hukum di masa datang, apalagi Indonesia sebagai salah satu yang menganut *civil law* yurisprudensi telah kehilangan ketajamannya dengan kata lain yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat.⁴⁷ *Civil law system* dimana menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang utama dalam penyelesaian perkara.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Di dalam kepustakaan tentang penelitian hukum lazimnya dikenal dua macam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum yuridis atau normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum yuridis atau normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan oleh karena itu dilakukan kajian terhadap data sekunder sebagai bahan pustaka, sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer atau data lapangan.⁴⁸ Bertolak dari uraian teoritis di atas mengenai tipologi penelitian maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan beberapa

⁴⁶ Jhon Rawls. *Op. Cit. hal. 21*.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta. hal. 31.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 1993. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hal. 9

pendekatan. *Pertama*, Pendekatan normatif ini akan dititikberatkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum tertentu atau sesuatu nilai filosofis tertentu, dalam hal ini adalah pengaturan delik kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, pendekatan empiris atau sosiologis yaitu melihat bagaimana realitas konsep *restorative justice* diterapkan untuk menemukan solusi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini adalah mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari Perkara Pidana No. 336 /Pid.B/2012/PN.Sbr. jo No. 372 /Pid.Sus/2012/PT.Bdg. jo No. 2238/K/Pid.Sus/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literature, makalah, perundang-undangan, pendapat para ahli, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu tujuan dan filosofi UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan konsep *restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara pidana.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam studi dokumen ini diantaranya menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Elemen penting dalam studi dokumen ini adalah bertitik berat pada Perkara Pidana No. 336 /Pid.B/2012/PN.Sbr. Pengadilan Negeri Sumber jo No. 372 /Pid.Sus/2012/PT.Bdg. Pengadilan Tinggi Bandung jo No. 2238/K/Pid.Sus/2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini ialah guna untuk menari dan mengumpulkan berbagai jenis bahan-bahan kepustakaan baik dcalam becentuk buku, jurna ilmiah, peraturan perundang-undangan, media masa ataupun elektronik yang dirasa sesuai dengan penelitian yang sedang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum dalam penelitian hukum normatif adalah melakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara seleksi data sekunder atau bahan hukum, selanjutnya melakukan klasifikasi dan penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis, artinya ada hubungan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data penelitian, diorganisasikan, dan diurutkan dalam suatu pola tertentu sehingga diharapkan dapat diperoleh dan dirumuskan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi pengaturan delik-delik dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, independensi dan kewenangan dalam hakim dalam membuat keputusan yang berbasis keadilan serta pertimbangan hukum yang berbasis konsep *restorative justice*.

6. Analisa Bahan Hukum

Analisa Bahan Hukum merupakan kegiatan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum, yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis bahan hukum dilakukan dengan memberikan kritik, dukungan, penolakan ataupun komentar dan selanjutnya membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian.⁴⁹ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini mempergunakan bahan hukum yang terkait dengan delik-delik dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, independensi dan kewenangan hakim dalam membuat keputusan yang berbasis keadilan serta pertimbangan hukum yang berbasis konsep *restorative justice*. Analisis dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Kerangka teori dimanfaatkan sebagai pedoman agar fokus penelitian sesuai fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penulis

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai penulis akan melakukan analisa Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia dari sisi hukum acara pidana dan penerapan *restorative justice* dalam putusan tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum dalam Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu didakwa dengan dakwaan alternatif:

Pertama, melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekekrasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: “ *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan*

⁴⁹ *Ibid. hal. 183*

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atau,

Kedua, melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi: “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Selanjutnya akan dibahas Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 372/Pid.Sus/PT.BDG, tertanggal 3 Oktober 2012 yang membatalkan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 7 Agustus 2012 No. 336/Pid.b/2012/PN.Sbr;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Dengan fokus pembahasan pada amar yang paling substansial, yaitu: Mengadili sendiri, dictum 1: Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

1. Tinjauan Hukum Acara Pidana

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem *rule of law*, yang saat ini lebih merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum legal, percampuran antara *civil law* dan *common law* namun demikian tetap menjadikan hukum tertulis sebagai pedoman utama bagi hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan (*asas legalitas*). Namun Putusan Putusan No. 2238 K/Pid.Sus/2013 yang sedang diteliti ini Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik tidak menjadikan hukum -hukum tertulis hukum acara pidana sebagai pedoman dalam menyusun pertimbangan hukumnya dan justru melakukan penyimpangan dengan alasan hukum acara pidana tidak harus difahami secara *legalistic positivistic*. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, antara lain:

- a. Pemeriksaan di persidangan yang tidak sesuai dengan Pasal 155 sampai dengan Pasal 191 KUHAP, dimana tahapan-tahapan yang semestinya dilalui adalah: Pemeriksaan Identitas, Pembacaan Dakwaan, Eksepsi jika ada, Putusan Sela, Pembuktian yaitu pemeriksaan alat bukti, Saksi-saksi mulai dari korban dan saksi-saksi, Pembacaan Tuntutan, Pledoi, dan Putusan Hakim.

Dalam perkara yang sedang diteliti ini seluruh rangkaian yang diamanatkan KUHAP tidak terpenuhi. Hakim setelah pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan oleh JPU pada sidang perdana tanggal 16 Juli 2012, pada sidang berikutnya tanggal 23 Juli 2012, dimana terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi melainkan menyodorkan 2 (dua) buah surat, yaitu: Pernyataan damai tertanggal 23 Juni 2012 dan Pencabutan Perkara tertanggal 23 Juli 2012, hakim setelah memeriksa 2 (dua) surat tersebut dan saksi korban, hakim kemudian menunda sidang, diagendakan pada tanggal 7 Agustus 2012 untuk membacakan Putusan Akhir/Putusan sela yang bersifat mengakhiri. Hal tersebut tentu mempunyai konsekwensi terhadap hak jaksa untuk melakukan penuntutan, dengan kata lain jaksa penuntut umum belum menentukan berapa tuntutan;

- b. Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik melanggar ketentuan pasal 75 KUHP: *“Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya itu dalam waktu tiga bulan setelah diajukan”*. Korban melakukan pelaporan pada 11 Desember 2011 namun pencabutan perkara oleh korban pada tanggal 23 Juli 2012 di Persidangan Pengadilan Negeri Sumber.
- c. Bahwa putusan tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum juga bertentangan hukum pidana formil terkait mengenai gugurnya penuntutan yang disebabkan beberapa hal antara lain: Meninggalnya pelaku kejahatan (Pasal 77 KUHP), Adanya asas *“Nebis in idem”* (Pasal 76 KUHP), Daluwarsa (Pasal 78 KUHP), Penyelesaian Perkara di Luar Persidangan (Pasal 82 KUHP), Amnesti dan Abolisi dari Presiden (Pasal 14 UUD 1945), dan tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan
- d. Kontroversi pada jenis putusan dan amar putusannya, yaitu: *Pertama*, apakah putusan tersebut adalah putusan sela ataupun putusan akhir ?. *Kedua*, dalam putusan akhir hanya dikenal 3 jenis Putusan, yaitu: Bebas, Lepas dan pembedaan.

Serangkaian ‘penyimpangan’ ini memang akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagai salah satu dari tujuan hukum selain keadilan dan kemanfaatan hukum namun jika dicermati sifat dari delik aduan seperti pendapat dikemukakan oleh Sudarto, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaendeerdepartij*). Dalam konteks perkara ini Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sejatinya adalah perkara pidana yang berdimensi privat namun terdorong menjadi bagian ke dalam ranah hukum publik akibat perluasan definisi korban dan perluasan jenis-jenis kekerasan yang termuat dalam undang-undang tersebut. Dalam kasus yang melibatkan suami isteri ini perdamaian yang terjadi mengakibatkan hukum pidana sebagai ranah hukum publik kehilangan urgensinya untuk diterapkan. Hakim Mahkamah Agung Republik menerapkan teori hukum responsif yaitu pertimbangan hukum lebih mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Hal tersebut terlihat dari beberapa pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim cenderung melihat permasalahan tersebut untuk tuntasnya permasalahan pihak yang berselisih, tercapainya substansi tujuan hukum.
- 2) Keterlambatan pencabutan perkara lebih dari tiga bulan secara normatif memang tidak dapat dibenarkan namun dari aspek perkawinan, sosioolgi, filosofis dan kemanusiaan dapat dibenarkan dengan alasan kemanfaatan atau kebaikannya jauh lebih besar daripada meneruskan perkara. *Secara das sollen* seharusnya pencabutan perkara tidak harus dibatasi karena merupakan hak korban. Delik aduan adalah ranah hukum privat sehingga ketika para pihak yang bersengketa telah berdamai maka hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat maka hukum pidana telah kehilangan urgensinya.

Pertimbangan hukum hakim diatas sesuai dengan teori hukum responsif yang disampaikan Nonet-Selznick. Hukum responsif sebagai sistem hukum yang terbuka merespon dinamika dan perkembangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan serta memprioritaskan keutamaan tujuan (*the sovereignty of purpose*). Keutamaan tujuan hukum yaitu tujuan sosial yang ingin diwujudkan serta dampak yang ditimbulkan dari

pelaksanaan atau bekerjanya hukum itu.⁵⁰ Hukum yang responsif sangat diperlukan terutama dalam masa transisi. Dengan kata lain, ketika sebuah aturan hukum yang diberlakukan dipandang kurang mampu lagi memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi akibat perkembangan kehidupan masyarakat, dimana aturan-aturan hukum yang ada belum mampu untuk menjangkaunya, sehingga hukum harus memiliki kepekaan dan akomodatif terhadap perkembangan masyarakat agar tercapai keadilan di masyarakat.⁵¹

2. Tinjauan Penerapan Konsep *Restoratif Justice*

Dalam membuat Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih mempertimbangkan faktor non yudisial. Pemulihan hubungan antara terdakwa dengan korban (suami isteri) melalui keberhasilan mediasi penal yang melibatkan Pihak Desa Grogol. Pendekatan *restorative justice* yang mana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi antara suami isteri. Hakim menilai penghentian perkara ini akan lebih memberi manfaat daripada melanjutkannya. Kemanfaatan pulihnya hubungan suami isteri sebagaimana tujuan dan filosofi UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sekaligus UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Keberhasilan mediasi penal sebagai salah satu aplikasi konsep *restorative justice*. Penyelesaian perkara dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik, sedang aparat penegak hukum dalam hal ini hakim bertindak seolah menjadi mediator. Konsep *restorative justice* sebagaimana definisi Marlina yaitu sebagai proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁵²

Dalam penyelesaian perkara ini meskipun Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berpedoman pada hukum acara pidana dalam putusannya, namun hakim memiliki keberanian moral untuk membuat putusan yang berkeadilan. hakim menjadikan kearifan moral yang terkandung dalam perikehidupan sosial yang lebih mengedepankan keharmonisan rumah tangga yang merupakan filosofi dan tujuan

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 29

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cet. I. Refika Aditama. Bandung hal. 180

disusunnya UU No. 23 Tahun 2004, dan amanah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Satu-satunya landasan yuridis formalnya adalah yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yaitu Putusan No. 1600 K/Pid.b/2009. Putusan ini merupakan salah satu *landmark decision* Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2011. Putusan ini secara jelas dan tegas dalam pertimbangannya menggunakan *Restorative Justice*. Majelis hakim dalam pertimbangannya, saat mengabulkan pencabutan perkara, namun demikian sejatinya fungsi yurisprudensi adalah untuk mengisi kekosongan hukum "*judge made law*" yang akan dijadikan pedoman kodifikasi hukum di masa datang, apalagi Indonesia sebagai negara yang menganut system *rule of law*, namun juga menganut system hukum campuran antara *civil law* dan *common law*. Saat ini baik di negara yang menganut *civil law* maupun *common law* yurisprudensi telah kehilangan ketajamannya dengan kata lain yurisprudensi tidak memiliki kekuatan mengikat. *Rule of law* dimana menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang utama dalam penyelesaian perkara

Dalam memutuskan perkara ini, dengan independensi dan kewenangannya hakim berijtihad semaksimal mungkin untuk menemukan formula putusan yang lebih menekankan keadilan substansif dari sekedar keadilan formil. Sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo bahwa para penegak hukum yang berjihad untuk memunculkan kekuatan hukum akan senantiasa memeras dan mendorong kata-kata dari teks hukum sampai ke titik paling jauh (*ultimate*) sehingga kekuatan hukum keluar dari persembunyiannya. Pengadilan tidak lagi semata-mata menjadi tempat menerapkan undang-undang, melainkan untuk menguji undang-undang. Hakim bukan *lagiles bouches, qui prononcent les paroles de la loi* (mulut yang mengucapkan kata-kata undang-undang melainkan *vigilante* atau mujtahid.⁵³

Dalam putusannya hakim lebih menggunakan metode penafsiran hukum teleologis, yaitu menempatkan tujuan dan filosofis UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memulihkan keharmonisan Rumah Tangga. Putusan tersebut juga merupakan bukti hal-hal yang harus ada yang merupakan tanggung jawab hakim dalam putusannya, yaitu: justisialis hukum, penjiwaan hukum, pengintegrasian hukum, totalitas hukum, dan personalisasi hukum sebagaimana pendapat Andi Hamzah. Dengan kata lain,

⁵³ Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta. hal. 55

putusan hakim telah memperhitungkan kemanfaatan yang berjiwa keadilan, integrasi peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial, dampak ekonomis dan sosial dengan tetap berdasarkan nilai moral dan religi, memandang para pencari keadilan adalah manusia yang memiliki keluhuran dimana hakim harus memberikan pengayoman melalui putusannya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih mengedepankan tujuan utama UU PKDRT yaitu pemulihan kegoncangan yang terjadi. Pernyataan damai yang berisikan pengakuan bersalah, dan permintaan terdakwa/suami dan kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta niat dari terdakwa untuk kembali membina keluarga yang harmonis adalah hakekat dari penyelesaian masalah yang paling dasar dari kehidupan rumah tangga. Pertimbangan hakim tersebut sesuatu dengan salah satu teori pemidanaan yaitu teori relative/tujuan (*utilitarian*) bahwa penjatuhan hukuman memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki atau merahabilitasi para pelaku kejahatan. Dasar pembedaan teori ini terletak pada tujuan pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum* (karena kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka sangat jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban masyarakat.⁵⁴

Putusan no. 2338 K/Pid.Sus/2013 meskipun menurut pendapat penulis sudah tepat namun tetap menimbulkan ruang perdebatan yaitu terkait dengan pemenuhan tiga unsur yang menjadi tujuan hukum, yaitu: Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Putusan hakim tersebut ditinjau dari Aspek Keadilan dan Kemanfaatan sudah terpenuhi namun dari Aspek Kepastian Hukum tidak terpenuhi.

Salah satu produk hukum yang terbit ditengah penelitian ini berjalan adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadailan Restoratif, terbit pada tanggal 21 Juli 2020 yang pada intinya pihak Kejaksaan Republik Indonesia berwenang untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berasaskan: a) keadilan, b) kepentingan umum, c) proporsionalitas, d) pidana sebagai jalan terakhir, e) cepat, sederhana, dan biaya ringan.

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hal. 45.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini seolah menjawab sebagian maksud dan tujuan penelitian ini namun demikian menurut penulis peraturan tersebut belum cukup memadai karena merupakan peraturan internal kejaksaan dan dari segi kekuatannya sebagai sebuah payung hukum tentu tidak setara kekuatannya jika dibanding dengan Undang-undang.

PENUTUP

1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013 perihal tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum jika dilihat dari sisi pidana formil penuh dengan berbagai penyimpangan, diantaranya: batas waktu pencabutan delik, gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum, dan jenis-jenis putusan hakim dalam persidangan pidana.
- 2) Bahwa dalam putusannya hakim Mahkamah Agung No. 2238 K/Pid.Sus/2013, lebih mengedepankan pertimbangan hukum non yuridis yaitu: adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban melalui mediasi penal sebagai aplikasi konsep *restorative justice*, sebagai sarana yang paling efektif untuk kembali menciptakan keharmonisan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga.
- 3) Bahwa hakim Mahkamah Agung lebih menekankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural dalam putusannya, sehingga hakim berani ‘keluar’ dari hukum pidana formil dengan kemandirian dan independensinya untuk menjadi pengayom para pencari keadilan, sesuai dengan filosofi dan tujuan UU PKDRT.

2. Saran

Bahwa berkaca penelitian ini pembaharuan hukum pidana khususnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga menjadi sebuah kebutuhan. Perlunya Pembaharuan hukum pidana baik formil maupun materi’il khususnya dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga di antaranya:

- 1) Penghapusan batas waktu pencabutan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori delik aduan, karena hakikatnya dalam delik aduan penuntutan adalah hak korban yang tidak boleh dibatasi waktunya.
- 2) Pengaturan kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap delik aduan, semisal melakukan penambahan pada sebab-sebab gugurnya penuntutan jaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77-82 KUHP. Penambahan yang dimaksud adalah adanya pencabutan pengaduan oleh korban di persidangan sebelum tuntutan jaksa penuntut umum. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, terbit pada tanggal 21 Juli 2020 namun demikian menurut penulis peraturan tersebut belum cukup memadai karena merupakan peraturan internal kejaksaan dari segi kekuatannya sebagai sebuah payung hukum tentu tidak setara kekuatannya jika dibanding dengan Undang-undang.
- 3) Pelembagaan konsep *restorative justice* melalui mediasi penal yang merupakan salah sebagai upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam kategori delik aduan, semisal pengapdosian sistem diversi seperti dalam sistem peradilan anak sebagai tahapan yang terus diupayakan baik di tingkat penyidikan/kepolisian, penuntutan/kejaksaan, maupun dalam persidangan sehingga tercipta suatu rumusan undang-undang yang komprehensif dan mencerminkan pelaksanaan *keadilan procedural* dan keadilan substansial dan penegakkan hukum dengan tidak melanggar hukum (*due process of law*) serta mewujudkan semua tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Kencana.
- Ahmad kamil, 2010, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 20120. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.*: Pustaka Magister. Semarang.
- Baharuddin Lopa. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Chazawi Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Wantjik Saleh. 1997. *Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Didik Sukardi. *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Mahkamah Vol. 9 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Eva Achjani Zulfa. 2011. *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban*. dalam buku *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*. Kerjasama LPSK dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.
- E. Utrecht. 2000. *Hukum Pidana II*. Pustaka Tinta Mas . Surabaya.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Normatif Sebagai ilmu hukum Deskriptif*, Alih Bahasa: H. Sumardi. Media Indonesia. Jakarta.
- John Rawls. 1972. *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press. dalam Hendro Wicaksono. 2012. *Putusan Hakim Di luar Dakwaan Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dalam buku *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

- Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Cet. I. Refika Aditama. Bandung.
- Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta.: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1988. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan Kedua.: Alumni. Bandung.
- Mulyani Mudis Taruma. 2012. *Agama Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Lembaga-lembaga Keagamaan*. Arti Bumi Intaran. Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Oemar Seno Adji. 1985. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Erlangga. Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. 2010. *Hukum Responsif*. terjemahan. Nusa Media. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1993. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Armico. Bandung.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi-fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Satjipto Rahardo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo 2003. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty. Yogyakarta.
- Sudarto. , 2013. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang..

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal/Makalah :

Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional, dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, (makalah yang disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka dies natalis ke-66 Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 17 Februari 2012).

Bambang Sutiyoso. 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*. Jurnal Hukum No. 2.

Muhammad Yusuf Siregar. 2014, *Analisa Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009)*". USU Law Jurnal, Medan

Internet :

Abdul hadi, [https://tirto.id/mengenal-sistem-hukum-di-berbagai-belahan-hukum-dunia,diakses pada tanggal 20 Februari 2020](https://tirto.id/mengenal-sistem-hukum-di-berbagai-belahan-hukum-dunia,diakses-pada-tanggal-20-Februari-2020).

Shinta Dewita Hayu dan Oetari Cintya Bramanti. 2014. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga RUU KUHP*. LBH APIK, <https://m.liputan6.com>. KDRT meningkat saat pandemic covid-19. Diakses 8 Juli 2020.

Mudjiati, *Penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, <http://djpp.depukumham.go.id/hukumpidana/85>, diakses pada tanggal 7 Juli 2020.

Putusan :

Putusan Nomor 1600 K/Pid.B/2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 2238 K/Pid.sus/2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia